

BAB I

A. Latar Belakang

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan data data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan.

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) meningkat. Hal ini juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntansi publik.

Laporan keuangan adalah media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi faktor kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dalam penelitian ini, hal pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011) dalam Rahmadani (2015). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya harus dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang penerintah.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Akuntansi keuangan daerah. Menurut Pemendagri No.59 Tahun 2007 dalam Anisma, Kenndy dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban palaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Namun, mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan (Fajar, 2011;3).

Perubahan atas sistem dan basis akuntansi dilakukan untuk mendapat laporan kaungan yang handal, relevan, dapat diperaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, Sistem Akuntansi yang lemah menyebabkan

laporan keuangan yang akan dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembedaan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah pemanfaatan Teknologi Informasi. Nurrillah (2014) menyatakan bahwa secara umum telah diketahui manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi, dan penyiapan pelaporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dan jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprosesing. Namun pengimplikasinya teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan mahal. Kendala penerapan teknologi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemeliharaan data, kondisi SDM yang ada, dan keterbatasan dana kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah adalah sistem pengendalian intern. Menurut (PP Nomor 60 Tahun 2008; Bodnar dan Hoopwood, 2010; Arenet al, 2012;298) dalam Budiasih, Ulupi dan Sudiarianti (2015) Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk menciptakan kendala laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern dibagi dari lima komponen diantaranya; a)

lingkungan pengendalian b) penilaian resiko c) aktivitas pengendalian d) informasi dan komunikasi serta e) monitoring.

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara optimal terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai akan tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Komaliah, Rofika dan Rahmadani (2015) dengan objek penelitian pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian mengganti sampel objek penelitian pada SKPD Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUKOHARJO PERIODE (2015-2016).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keungan Daerah) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

- 3 Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan

1. Menganalisis kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
3. Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktis

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi kepada praktisi di Indonesia dimasa yang akan mendatang, dan memberi wawasan kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintah Indonesia pada khususnya.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu ini memuat mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, kerangka konseptual, pengembangan hipotesis, serta penelitian terdahulu.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis pengujian hipotesisnya dan pembahasannya, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan hasil analisis data, saran- saran yang diberikan dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.